

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) YANG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DESA (PADES) DI DESA PUJIHARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**

**Administrasi Publik**



**OLEH:**

**ROSEVENERIAL GISELA BOLENG**

**2019210097**

**KONSENTRASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana tanggung jawab pengelolaan BUMDes yang berdampak pada PADes di desa Pujharjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan analisis data menggunakan data primer dan data sekunder. Cara mengumpulkan data ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Akhir dari penelitian ini diketahui bahwa BUMDes di desa Pujharjo diketahui melaporkan dari semua jenis kerja kepada kepdes, pengawas dan tokoh masyarakat satu tahun sekali. Dari mengelola BUMDes yaitu pelaporan, bisnis BUMDes barunya yaitu mengelola bisnis bilangan, bisnis simpan pinjam telah diperluas ke bisnis Sangomil dan pengelolaan limbah. Laporan perkembangan unit usaha BUMDes disampaikan pada rakyat hanya sekali dalam setahun pada pertemuan desa. Hal ini berdampak pada usulan yang lemah atau tidak akurat dan ide-ide baru yang dibuat pada pertemuan desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pujharjo mengalami peningkatan namun secara perlahan karena musyawarah yang hanya diadakan setahun sekali, laporan rawan terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti kasus korupsi.

**Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan nasional diperlukan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari kemajuan desa dan kesejahteraan warganya. Seluruh penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, mengharapkan pendapatan yang layak dan mampu menggunakan seluruh potensi desanya untuk memenuhi kebutuhannya. BUMDes merupakan perusahaan yang sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa. BUMDes adalah sarana yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan mengelola sarana sesuai dengan kebutuhan dan perekonomian desa (Nugroho, 2021).

BUMDes didirikan oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan setiap potensi ekonomi, ekonomi, alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. UU Desa No 6 Tahun 2014 merupakan Keppresnya tentang BUMDes yang menggabungkan terbitnya UU Desa No 6 Tahun 2014 dan Keppres No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Ordonansi Menteri Desa. Definisi bentuk badan ekonomi desa dalam UU No 2 Juni 2014 diatur UU Desa Pasal 1 No 6. Hal ini menjelaskan pentingnya BUMDes itu sendiri. Itu adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari harta kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola barang, jasa dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Badan hukum yang bermodalkan utama kekayaan desa. BUMDes sesuai dengan Pasal 213 (1) UU. Pasal 32 Thn 2004 mengatur bahwa usaha tani dibangun

sesuai dengan keperluan bersama . Keputusan angka. 72 Thn 2005 BUMDes “dalam desa”, khususnya Pasal 78 sampai 81(5) dan juga dalam Pasal 78 Keputusan Menteri Dalam Negeri. 72 untuk bisnis pedesaan. Pada tahun 2010 bagian administrasi terdiri dari 39 orang orangnya. Badan Usaha ialah badan pertanian yang secara finansial dan profesional beroperasi secara mandiri, yang sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan masing-masing desa. Berbagai cara dijalankan desa memperoleh keuntungan tersendiri, (Minawati, 2018).

Peméndez angka 4 Thn 2015:tanggung jawab BUMDes bahwa pelaksana operasional harus menyampaikan tanggung jawab ke Kepala Desa yang sebelumnya ditunjuk oleh kepala desa. Keberhasilan BUMDesnya dalam perbaikan desa harus kolaboratif, partisipatif, membebaskan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan (Herry Kamiroesid, 2016). Pengelolaan keuangan desa harus transparan. Dengan demikian, organisasi secara terbuka memberikan informasi penting dan relevan yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan (Atmadja, Anantawikrama, 2013).

Sebagai sistem pelaporan yang menjamin kepercayaan publik, pengelola BUMDes harus bertanggung jawab. Hal ini perlu ditelaah karena masih banyak pengelola BUMDesnya yang menyepelkan tanggung jawab pelaporannya. Akuntabilitas membuat wali lebih takut berbuat salah. Memerangi korupsi membutuhkan akuntabilitas dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan PADES. Karena akuntabilitas menjamin kepercayaan masyarakat, ia perlu mempertimbangkan bagaimana mengelola BUMD dalam hal akuntabilitas kepada pemerintah desa. Pemerintah harus memastikan bahwa pembentukan BUMDes

tidak sekedar menyalurkan dana desa sedemikian rupa sehingga penyerapan dana desa menjadi optimal. Kehadiran BUMDes memungkinkan desa dan masyarakat menjadi mandiri, berkontribusi terhadap peningkatan PAD yang disalurkan melalui APBDes. Pengelola anggaran desa tunduk pada peraturan Dinas Dalam Negeri. Menurut Pasal 113 Thn 2014: Pemda, Dana Desa .

Untuk mencapai tata kelola yang baik, akuntabilitas yang efektif dan efisien harus diterapkan. Akuntabilitas dicapai. Disini kita perlu memaksimalkan peran BUMDes nya untuk meningkatkan PDes. PADE dapat berasal dari hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan desa lainnya yang sah. Hasil desa ini seperti pendapatan asli desa dan diharapkan memiliki proporsi terbesar. Pendapatan Asli Desa (PDes). BUMDes dibentuk pemerintah dan masyarakat desa berdasarkan keunikan. Potensi memanfaatkan sumber daya alam dan manusia setempat. Keberhasilan BUMDes dapat dinilai tidak hanya dari berapa lama beroperasi, tetapi juga dari kontribusi yang telah mereka berikan kepada desa dan dalam kesejahteraan bersama (Kohen, 2018).

Operasi instansi tidak didirikan untuk bersaing, tetapi untuk memenuhi upaya masyarakat sebelumnya. Maka dilakukan secara transparan, partisipatif. Laporan keuangan mencerminkan keadaan suatu badan usaha (BUMDes) dan merupakan bagian penting dari informasi yang membantu pengambilan keputusan tentang keberlanjutan jangka panjang badan tersebut. Pelaporan keberlanjutan berperan dalam membawa bisnis interval BUMDes berikutnya. Kami akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri dengan mengincar peningkatan penjualan

dan keuntungan yang stabil. Pengelolaan BUMDes membutuhkan akuntabilitas yang baik.

BUMDes didirikan di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang dan Kecamatan Tirtoyudo. Di desa Pujiharjo, permasalahan seperti masalah sumber daya manusia dan waktu masih ada dalam pengelolaan BUMDes, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes belum maksimal. Faktor manusia pengelola BUMDes selama ini menjadi mata rantai yang lemah dalam pengembangan BUMDes. Dikarenakan pengurus BUMDes merangkap jabatan pada instansi lain, maka pengurus lebih fokus pada tugas pokoknya daripada BUMDesnya, sehingga tidak efisien waktu dalam mengelola/memantau BUMDes. Mereka juga memiliki keterlibatan masyarakat yang rendah karena pengetahuan mereka yang rendah. Akuntabilitas ini memperhitungkan tujuan implementasi dan dampak masyarakat dari program BUMDesnya di desa Pujiharjo, karena akuntabilitas program menjelaskan apakah program yang dilaksanakan telah tercapai, konsisten dengan tujuan yang dimaksudkan, atau tidak dilaksanakan secara optimal. Maka tertarik dengan judul 'pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes yang berpengaruh terhadap peningkatan PADes.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka dirumuskan dalam rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana tingkat tanggung jawab pengelolaan BUMDes yang berdampak pada peningkatan PADes di Desa Pujharjo?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan BUMDes yang mempengaruhi peningkatan PADes di Desa Pujiharjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan BUMDes berpengaruh terhadap peningkatan PADes di desa Pujiharjo.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang berpengaruh terhadap peningkatan PADes di desa Pujiharjo

### **1.4 .Manfaat Penelitian**

Efek berikut ditujukan untuk :

1. Untuk BUMDes

Selalu ada harapan bahwa dalam membangun BUMDes. Tujuannya membantu seluruh masyarakat dalam aspek sosial, hukum, dan ekonomi.

2. Untuk peneliti

Perluas pengetahuan Anda dan dapat menafsirkannya bagi mereka yang membutuhkannya, terutama komunitas Anda.

3. Untuk pemerintah

Lembaga dan kelembagaan selalu diharapkan dapat lebih memperkuat masyarakat dan mendukung BUMDes agar dapat berfungsi dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., H. G. Sabanu, dan F. Noor. 2015. *Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol. 1 No. 1: 24-27.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- David Wijaya, S.E., M.M. 2018 *BUM DESA* Jakarta: Penerbit Gava media.
- Herry Kamaroesid, (2016), *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papper Ekonomi dan Bisnis*, 41-51.
- KrinaL.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UI Press.



- Mirnawati, 2018 *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan).*
- Moleong, Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). *Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaab APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes*. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Nugroho, Riant (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3*. PT Eley Media Komtindo.
- Pramita, Y. D. (2018). Analisis Pemahaman Permendesa No. 4 Tahun 2015 Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16, 1-8.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). "Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 64–71.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma U. N., & Masrunik, E. (2017). Transparansi Sisa Hasil Usaha BUMDes Dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah Sebagai Strategi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Desa. *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Ekonomi dan Bisnis*, Hal 52-57.
- Sumpeno, Wahyudin. 2013. *Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development*. Banda Aceh
- Sumpeno, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read*.
- Sujarweni, V.W.,. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.